



# **LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO**

**TAHUN  
2025**

**Disiapkan oleh:**

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan uraian tentang upaya BPKAD untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MS. HERUWIDI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. N 9690219 198809 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
D. RUANG LINGKUP .....	3
<b>II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....</b>	<b>3</b>
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI .....	3
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	4
<b>III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN .....</b>	<b>4</b>
A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN .....	4
B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO.....	5
C. HASIL ANALISIS RISIKO.....	8
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN.....	13
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN .....	14
<b>IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....</b>	<b>17</b>
<b>V. RANCANGAN PEMANTAUAN .....</b>	<b>18</b>
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan risiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian risiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian risiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis

- organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
  - d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
  - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
  - f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
  - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian risiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian risiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran apparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

Sedangkan untuk hasil penilaian terkait komitmen terhadap kompetensi, apabila dari hasil review dokumen telah cukup memadai namun dari hasil survei persepsi masih kurang memadai.

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian risiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian risiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan risiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

## **III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

### **A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN**

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Opini BPK. Sehingga tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu

tahunan maka sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”.

## **B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu risiko. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional. Adapun uraian identifikasi risiko sebagai berikut :

**Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	Tidak bisa mempertahankan WTP	RSO.24.37.09.00	BPKAD Kab. Lamongan	Kurangnya konsistensi dan pengawasan serta penurunan kualitas dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Eksternal dan Internal	C	Opini atas LKPD menjadi turun	Pemerintah Kab. Lamongan	
2	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal dan Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri	RSO.25.37.09.01	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi belum optimal, terkendala aplikasi yg sedang eror atau maintenance dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh OPD	Eksternal dan Internal	C	Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD	Pemerintah Kab. Lamongan	
		Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja	RSO.25.37.09.02	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kurangnya akurasi dalam penyusunan rencana kas bulanan oleh SKPD	Eksternal dan Internal	C	Gangguan arus kas yang berdampak pada pelaksanaan program lainnya	Pemerintah Kab. Lamongan	
		Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP	RSO.25.37.09.03	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketidaktahuan OPD atas format dan aturan pelaporan yang sesuai SAP	Eksternal dan Internal	C	Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun	Pemerintah Kab. Lamongan	
		Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi	RSO.25.37.09.04	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterbatasan SDM dan kurangnya pembaruan data terkait status kepemilikan	Eksternal dan Internal	C	Aset daerah tidak dimanfaatkan secara optimal atau hilang tanpa diketahui	Pemerintah Kab. Lamongan	

**Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD**

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	Pengaggaran	Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan	ROO.24.37.09.01	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Adanya perencanaan awal anggaran yang masih belum matang serta kebutuhan anggaran yang mendesak	Eksternal dan Internal	C	Penyusunan Perencanaan APBD menjadi tidak efisien dalam menjalankan program kinerja daerah	Pemerintah Kab. Lamongan
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Pelaksanaan	Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD	ROO.24.37.09.03	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Kelalaian bendahara terhadap perhitungan perpajakan serta adanya perbedaan aplikasi dalam perhitungan pajak	Eksternal dan Internal	C	Mendapatkan teguran dan penagihan adanya kurang bayar. Serta denda administrasi dan sanksi dari instansi pajak apabila tidak segera dibayarkan	Pemerintah Kab. Lamongan
3	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Pelaksanaan	Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah)	ROO.24.37.09.07	Bidang Aset BPKAD Lamongan	1. Dokumen perjanjian pemanfaatan aset daerah masih menggunakan perda lama (harga lama) tidak disesuaikan dengan harga baru 2. Belum memiliki pejabat penilai dalam melakukan proses penilaian aset daerah	Eksternal dan Internal	C	Kurangnya pemanfaatan aset daerah dapat menurunkan pendapatan asli daerah yang bisa digunakan dalam pembangunan daerah	Pemerintah Kab. Lamongan
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang di susun	Pelaporan	Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi	ROO.24.37.09.08	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman admin OPD atas pencatatan transaksi keuangan 2. Adanya sistem rekonsiliasi yang berjalan tidak efektif antar OPD	Eksternal dan Internal	C	Mengakibatkan laporan konsolidasi tidak valid dan akuntabel, serta menurunkan kualitas dan opini audit LKPD	Pemerintah Kab. Lamongan

### C. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian risiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

**Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Risiko**

<b>Kriteria Risiko</b>	
<b>Kriteria Kemungkinan</b>	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

**Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Risiko**

<b>Kriteria Risiko</b>	
<b>Kriteria Dampak Risiko</b>	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak risiko, maka perlu juga mengetahui tingkatan risiko dimana tingkatan risiko merupakan hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan risiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status risiko yang akan diuraikan. Perhitungan nilai tingkatan risiko sebagai berikut :

### Tabel III.5 Tingkatan Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

## Keterangan :

Nilai  $\leq 4$  = Hijau Nilai  $9 - 14$  = Oranye

Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang referensi nilai kemungkinan dan referensi nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari risiko dengan tingkat terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Peringkat status risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko. Adapun uraian status risiko sebagai berikut:

### Tabel III.6 Status Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

### Keterangan :

Hijau = Rendah

Orange = Tinggi

Kuning = Sedang

Merah = Sangat Tinggi

Dari tabel penilaian analisis tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis risiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis risiko strategis maupun risiko operasional, sebagai berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri	RSO.25.37.09.01	10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi belum optimal, terkendala aplikasi yg sedang eror atau maintenance dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh OPD	Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja	RSO.25.37.09.02	12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kurangnya akurasi dalam penyusunan rencana kas bulanan oleh SKPD	Gangguan arus kas yang berdampak pada pelaksanaan program lainnya
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP	RSO.25.37.09.03	7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketidaktahuan OPD atas format dan aturan pelaporan yang sesuai SAP	Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi	RSO.25.37.09.04	10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterbatasan SDM dan kurangnya pembaruan data terkait status kepemilikan	Aset daerah tidak dimanfaatkan secara optimal atau hilang tanpa diketahui

**Gambar 1 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Strategis Si Mario**

Risiko Operasional OPD						
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan	R00.25.37.09.01	14	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Adanya perencanaan awal anggaran yang masih belum matang serta kebutuhan anggaran yang mendesak
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD	R00.25.37.09.02	10	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Kelalaian bendahara terhadap perhitungan perpajakan serta adanya perbedaan aplikasi dalam perhitungan pajak
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah)	R00.25.37.09.03	5	Bidang Aset BPKAD Lamongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perjanjian pemanfaatan aset daerah masih menggunakan perda lama (harga lama) tidak disesuaikan dengan harga baru</li> <li>2. Belum memiliki pejabat penilai dalam melakukan proses penilaian aset daerah</li> </ol>
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi	R00.25.37.09.04	7	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman admin OPD atas pencatatan transaksi keuangan</li> <li>2. Adanya sistem rekonsiliasi yang berjalan tidak efektif antar OPD</li> </ol>

**Gambar 2 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Operasional Si Mario**

Dari kedua gambar hasil analisis risiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa hasil analisis risiko strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Risiko Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri memiliki nilai skala Risiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sangat sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan akan tetapi risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Risiko Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja memiliki nilai skala risiko sebesar 12 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
3. Risiko Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP memiliki nilai skala risiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Risiko Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi memiliki nilai skala risiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan atau sedang sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.

Sedangkan hasil analisis risiko operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Risiko Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan memiliki nilai skala risiko sebesar 14 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Risiko Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD memiliki nilai skala risiko sebesar 10 dengan warna Oranye, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan sangat signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.

3. Risiko Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) memiliki nilai skala risiko sebesar 5 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sangat jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan juga sangat signifikan sehingga risiko yang dimiliki masih tergolong sedang.
4. Risiko Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi memiliki nilai skala risiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong sedang.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi risiko strategis sebagai berikut:

1. Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Jadwal penginputan anggaran pada aplikasi SIPD Kemendagri sudah disusun dan disosialisasikan.
2. Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Pemantauan realisasi belanja telah dilakukan secara bulanan.
3. Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP dengan pengendalian risiko yang sudah ada Adanya pedoman Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Telah dilakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi terhadap pelaporan aset daerah secara tribulanan.

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi

risiko operasional sebagai berikut :

1. Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan dengan pengendalian Risiko yang sudah ada yakni Terdapat mekanisme penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran terkait perubahan / pergeseran APBD.
2. Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Koordinasi secara rutin dan berkala pada masing-masing Bendahara terkait aturan perpajakan dan pelaporan.
3. Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Adanya pengaturan dan syarat terkait harga melalui peraturan atau perjanjian sewa terhadap penggunaan BMD.
4. Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Telah dilakukan Konsolidasi data secara bulanan, triwulanan, tahunan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

## **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu dibangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko baik risiko strategis

maupun operasional sebagai berikut :

**Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

Uraian Risiko	Pengendalian Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
<b>Risiko Strategis</b>			
Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri	Jadwal penginputan anggaran pada aplikasi SIPD Kemendagri sudah disusun dan disosialisasikan	Kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap keterlambatan input data oleh OPD	Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD
Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja	Pemantauan realisasi belanja telah dilakukan bulanan	Ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi akibat perubahan kebijakan fiskal daerah	Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas.
Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP	Adanya pedoman Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan	Kurangnya pemahaman teknis dari beberapa operator OPD terhadap format SAP.	Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan.
Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi	Telah dilakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi terhadap pelaporan aset daerah secara tribulanan	Masih baterdapat OPD yang belum menyerahkan data aset secara lengkap dan akurat.	Melaksanakan audit secara meneyeluruh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah

Uraian Risiko	Pengendalian Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
<b>Risiko Operasional</b>			
Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan	Terdapat mekanisme penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran terkait perubahan / pergeseran APBD	Proyeksi anggaran awal kurang akurat dan seringkali tidak dapat memperhitungkan dinamika kebijakan fiskal daerah	Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran
Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana	Koordinasi secara rutin dan berkala pada masing-masing Bendahara terkait aturan perpajakan dan pelaporan	Kurangnya ketelitian pada saat verifikasi ulang atas data setor pajak yang dilakukan oleh OPD.	Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah.
Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah)	Adanya pengaturan dan syarat terkait harga melalui peraturan atau perjanjian sewa terhadap penggunaan BMD	Adanya oknum yang menyalahi peraturan dan syarat terkait harga sewa penggunaan BMD	Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen.
Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi	Telah dilakukan Konsolidasi data secara bulanan, triwulanan, tahunan realisasi	Terdapat kelalian dalam proses input penyusunan laporan keuangan oleh admin keuangan	Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD

#### IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalannya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
<b>Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:</b>				
1	Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
2	Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas.	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
3	Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan.	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
4	Melaksanakan audit aset secara menyeleuruh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan

**Gambar 3 Lampiran Form 8 Infokom Risiko Strategis Si Mario**

<b>Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:</b>				
1	Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
2	Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah.	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
3	Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen.	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
4	Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan

**Gambar 4 Lampiran Form 8 Infokom Risiko Operasional Si Mario**

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

## **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi risiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantauan penyusunan Perda dan Perbup, penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan APBD, pengamanan asset serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah dengan senantiasa melakukan pendampingan secara langsung melalui rekonsiliasi setiap bulan, tribulanan bahkan semesteran. Serta melakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi Keuangan Daerah baik aplikasi internal seperti SAKTI, SIPPLA, e-asset, maupun aplikasi nasional seperti SIPD.

## VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, Mei 2025

